



## **Sosialisasi Kelembagaan dalam Manajemen Bencana berbasis *Community Governance* di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar**

**Joko Pramono<sup>1\*</sup>, Jacika Pifi Nugraheni<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Slamet Riyadi, Solo, Indonesia  
\* masjepe69@gmail.com

**Abstract:** Ngargoyoso District, Karanganyar Regency is a disaster-prone area, especially landslides. In 2022 the largest number of disaster victims will come from Ngargoyoso District. Of the seven types of incidents, the most victims came from landslides, with as many as 100 victims affected. In 2023 the information that was officially recorded was that there were 3 landslides and several other landslides that had not been recorded. The level of risk of landslides in this area needs attention from stakeholders and the community. Several reasons are because this area has complex land use characteristics and is important for the preservation of nature and culture. These land uses include: (i) protected forest; (ii) agriculture; (iii) residents' settlements; (iv) public services; (v) mining; and (vi) economy and tourism development. The high level of regional disaster risk has not been supported by an adequate and strong disaster institutional system, so that the disaster management process that is carried out does not include disaster prevention or mitigation, but only spontaneous handling when a disaster occurs. The most obvious weakness in the absence of an institutional disaster management system is the ineffective handling of landslides at several points in adjacent village locations at the same time. The ineffectiveness of disaster management is indicated by information that the disaster management that was carried out could not be completed completely and some were even left untreated. Socialization regarding the awareness of the importance of building a strong disaster institutional system and knowledge of the holistic disaster management process needs to be carried out. In this article Community Governance is the main approach used to design institutional systems in disaster management.

**Keywords:** Disaster Management, Community Governance, institutional.

**Abstrak:** Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar merupakan daerah rawan bencana khususnya tanah longsor. Pada tahun 2022 jumlah korban bencana terbanyak berasal dari Kecamatan Ngargoyoso. Dari tujuh jenis kejadian, korban terbanyak berasal dari bencana tanah longsor yakni sebanyak 100 korban terdampak. Tahun 2023 informasi yang tercatat secara resmi yakni sejumlah 3 kejadian tanah longsor dan beberapa kejadian tanah longsor lainnya belum tercatat. Tingkat resiko bencana longsor daerah ini perlu mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan serta masyarakat. Beberapa alasannya yakni karena daerah ini memiliki karakteristik penggunaan lahan yang kompleks dan penitng bagi kelestarian alam maupun budaya. Penggunaan lahan tersebut antara lain : (i) hutan lindung; (ii) pertanian; (iii) permukiman warga; (iv) pelayanan umum; (v) pertambangan; serta (vi) ekonomi dan pengembangan pariwisata. Tingginya tingkat resiko kebencanaan daerah ini belum didukung dengan sistem kelembagaan kebencanaan yang memadai dan kuat, sehingga dalam proses manajemen bencana yang dilakukan tidak mencakup adanya pencegahan maupun

mitigasi bencana melainkan hanya spontanitas penanganan pada saat terjadi bencana. Kelemahan yang paling nyata dari tidak adanya sistem kelembagaan kebencanaan ini yakni kurang efektifnya penanganan ketika terjadi bencana tanah longsor diwaktu bersamaan di beberapa titik lokasi desa yang berdekatan. Tidak efektifnya penanganan bencana diindikasikan dengan informasi bahwa penanganan bencana yang dilakukan tidak bisa sampai tuntas bahkan ada yang tidak tertangani. Sosialisasi mengenai kesadaran pentingnya membangun sistem kelembagaan kebencanaan yang kuat dan pengetahuan tentang proses manajemen bencana secara holistik perlu dilakukan. Dalam artikel ini *Community Governance* menjadi pendekatan utama yang digunakan untuk merancang sistem kelembagaan dalam manajemen bencana.

**Kata kunci:** Kelembagaan, manajemen bencana, tata kelola komunitas.

## ANALISIS SITUASI

Bencana selalu terjadi di sepanjang sejarah manusia. Peningkatan frekuensi dan keparahan bencana diakibatkan karena beberapa bencana tidak dapat diprediksi atau diantisipasi (Adiyoso, 2018; Putra, 2020). Isu kebencanaan menjadi perhatian seluruh dunia, terbukti dari beberapa kebijakan internasional yang berfokus pada penanggulangan bencana sekaligus berkembangnya lembaga-lembaga yang turut mengkaji secara khusus bencana di berbagai tingkat baik nasional maupun internasional (Adiyoso, 2018).

Perkembangan pemahaman tentang bencana sangat kompleks. Terdapat beberapa pendapat ilmuwan yang berbeda mulai dari perspektif umum kebencanaan, perspektif sosiologi, perspektif psikologi, perspektif agama dan konsep bencana lainnya (Adiyoso, 2018). Dari perspektif umum, kebencanaan diartikan sebagai suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh kondisi alam dan non alam (Undang-Undang No.24 Tahun 2007; Ulum, 2014; Adiyoso, 2018; Putra, 2020). Bencana karena kondisi alam misalnya gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, banjir, pasang surut air, kekeringan. Selain itu bencana alam dalam kategori biologi misalnya epidemi atau wabah yang bisa menjadi endemi dan pandemi juga dapat terjadi, yakni bencana yang diakibatkan dari penyakit yang ditimbulkan dari organisme paling kecil (virus, bakteri, jamur) yang mempengaruhi kesehatan hidup manusia maupun hewan) (Ulum 2014; Adiyoso, 2018; Putra, 2020). Sedangkan kondisi bencana non alam misalnya kecelakaan

industri, pertikaian, dan kejadian luar biasa lainnya yang menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa akibat perbuatan manusia (Adiyoso, 2018).

Beberapa negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi yakni Negara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab tingginya potensi Indonesia menjadi negara rawan bencana alam khususnya adalah kondisi letak geografisnya. Wilayah Indonesia adalah tempat pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu (i) lempeng Hindia Australia; (ii) lempeng Euroasia; (iii) lempeng Pasifik. Akibat adanya daerah penujaman antar lempeng ini maka Indonesia Indonesia menjadi memiliki jalur gempa dan jalur sabuk gunung api (Harijoko dkk, 2021).

Pada tahun 2023 telah terjadi 1.080 kejadian bencana di Indonesia yang mengakibatkan 2.888.592 masyarakat mengalami kerugian dan menderita. Berdasarkan frekuensinya, kategori kejadian bencana di Indonesia diakibatkan karena bencana alam yakni bencana akibat iklim seperti banjir sebanyak 661 kejadian, cuaca ekstrim sebanyak 608 kejadian, tanah longsor sebanyak 325 kejadian, kebakaran hutan sebanyak 170 kejadian, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 18 kejadian, kekeringan sebanyak 9 kejadian, dan erupsi gunung api sebanyak 2 kejadian (Data BNPB 2023).

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu wilayah perbukitan yang terletak di lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki karakteristik lereng terjal, batuan penyusunnya berupa endapan vulkanik muda produk Gunung Lawu, tanah pelapukannya cukup tebal dan curah hujannya cukup tinggi, sehingga potensi bencana tanah longsor cukup besar di wilayah ini (*Ramadhani dan Idajati, 2017; Harijoko, dkk, 2021; Syukur, 2021; Naryanto, 2021*). Pada tahun 2016 hingga 2020 tercatat 224 kejadian tanah longsor (BPBD Kabupaten Karanganyar, 2020). Beberapa berita di media massa menginfokan adanya bencana tanah longsor di wilayah ini, antara lain : (i) tanggal 15 Februari 2023 terjadi tanah longsor di Dusun Nglerak Desa Segoro Gunung (<https://jogja.tribunnews.com/2023/02/16/>); (ii) Tanggal 17 Maret 2023 terjadi longsor di Dusun Ngrancakan Desa Puntukrejo yang mengakibatkan bagian depan rumah warga rusak parah; (iii) tanggal 24 Maret 2023 terjadi bencana longsor Desa Nglegok yang menyebabkan beberapa akses jalan penghubung antar desa menjadi terisolir(<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6636600/>).

Informasi dari masyarakat setempat, di wilayah ini sering terjadi longsor, kejadian tanah longsor bahkan biasa terjadi ketika tidak sedang dalam kondisi hujan. Kejadian bencana longsor ini diakui perangkat desa setempat tidak semua diliput oleh media. Hal ini juga diperkuat dengan hasil pantauan data di website BPBD Kabupaten Karanganyar yang tidak sama dengan laporan jumlah kejadian bencana tanah longsor khususnya oleh masyarakat. Kejadian ini menjadi lebih dramatis karena banyak korban terdampak dari kalangan warga miskin.

Dari sisi lain, karakteristik penggunaan lahan Kecamatan Ngargoyoso sangat potensial bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Saat ini daerah ini menjadi prioritas pengembangan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Adapun berbagai karakteristik penggunaan lahan di daerah ini yakni: (i) hutan lindung salah satunya yakni Tenggir Park Desa Berjo Dusun Tambak; (ii) pertanian di seluruh wilayah Kecamatan Ngargoyoso; (iii) permukiman warga tersebar dan terpusat di masing-masing desa; (iv) pelayanan umum tersebar di masing-masing pusat kegiatan desa; (v) pertambangan di daerah Desa Kemuning yakni Kaolin, di Desa Berjo dan Segorogunung yakni tambang batuan andesit, serta tanah urug di Desa Ngargoyoso, Girimulyo, dan Puntukrejo; (vi) ekonomi dan pengembangan pariwisata, terbanyak di daerah Puntukrejo, dan Desa Kemuning (Hartono, 2020).

Tantangan kebencanaan yang sering terjadi dan banyaknya potensi penggunaan lahan produktif di kecamatan Ngargoyoso tersebut, membuat daerah ini patut diperhatikan. Perlu upaya serius sebagai solusi untuk mencegah terjadinya bencana, meminimalisir dampak maupun memperkuat sistem penanganan bencana. Jika dibiarkan dengan kondisi di mana frekuensi bencana khususnya tanah longsor yang sering terjadi, maka potensi kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bisa merusak fasilitas umum, dan lahan pertanian, namun juga secara tidak langsung dapat melumpuhkan kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah ini (Syukur, 2021).

Sosialisasi sistem kelembagaan manajemen bencana menjadi salah satu langkah awal sebagai upaya menjadikan daerah Ngargoyoso tangguh bencana. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membangun masyarakat (*community development*) yang lebih sadar terhadap tanda-tanda kebencanaan, bagaimana

mencegah terjadinya bencana, meminimalisir dampak dan mengerti prosedur penanganan bencana. Selain itu, diharapkan masyarakat juga lebih memperhatikan kelestarian lingkungan, dan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan bencana.

Sosialisasi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama bukan obyek yang merupakan tujuan. Hal ini didasari pandangan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan umum dalam mendiskripsikan lingkungannya daripada orang lain. Selain itu masyarakat juga yang mengalami resiko bencana sekaligus penerima manfaat dari adanya pengetahuan dan tindakan manajemen bencana. Dalam tataran teoritis pandangan tersebut disebut dengan *community governance* yang meyakini bahwa masyarakat memiliki peran yang besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, karena masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh perorangan atau kelompok lain yang mana dalam hal ini dapat diartikan pemerintah (Bowles dan Ginitis 2002; Setyaningsih dan Yuliani, 2022).

Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan sehingga ada integrasi mengenai informasi bencana dan pendidikan manajemen kebencanaan (Totikidis, Amstrong & Francis, 2005). Informasi yang memadai dan pembentukan sistem kelembagaan terkait struktur koordinasi yang jelas akan membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan manajemen bencana.

## **METODE DAN TEKNIS KEGIATAN**

Metode pelaksanaan program kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan model sosialisasi. Pelaksanaanya dilakukan secara langsung pada bulan Maret 2023 tepatnya di dukuh Jenak RT 01 RW 1 Desa Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Ngargoyoso.

Program sosialisasi ini berfokus pada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kapasitas tentang keseluruhan proses manajemen bencana serta terbentuknya sistem kelembagaan dalam manajemen bencana yang didasari oleh perspektif *community governance*. *Community Governance* dalam arti sederhana yakni menempatkan komunitas sebagai tumpuan utama dalam mendesain, memutuskan dan mengelola sebuah program (Bowles & Ginitis 2002;

Toikidis, Amstrong & Francis, 2005; Hamid, 2020). Adapun tahapan program pengabdian yang dilakukan yakni :

1. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan persiapan dilakukan survey kualitatif beberapa warga di desa Ngargoyoso terkait masalah kebencanaan dan pemetaan lokasi. Selain itu juga berkoordinasi dengan pihak masyarakat dan perangkat desa terkait pelaksanaan pengabdian.

2. Tahapan Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan, dilakukan dengan pemaparan materi tentang kebencanaan dan materi tentang pentingnya peran komunitas dalam kelembagaan manajemen bencana, dilanjutkan dengan diskusi.

3. Tahapan Pendampingan

Dalam tahapan ini pada tataran masyarakat dilakukan penyusunan strategi kelembagaan berbasis komunitas dan pada tataran perangkat desa dilakukan kolaborasi dengan pakar hukum untuk pendampingan pembuatan peraturan bersama kepala desa terkait manajemen bencana.

4. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Dalam tahapan ini dilakukan kunjungan untuk melakukan evaluasi terkait kemajuan yang sudah dilakukan.

Tolok ukur keberhasilan sosialisasi ini yakni adanya perubahan perilaku oleh masyarakat dalam upaya pencegahan bencana, dan terwujudnya system kelembagaan berbasis masyarakat. Tujuan jangka panjang yakni agar terwujud masyarakat desa Ngargoyoso yang tangguh bencana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peningkatan pengetahuan untuk sadar terhadap kesiapsiagaan bencana dan pengurangan dampak bencana dapat dilakukan dengan sosialisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 26 menyebutkan bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan. Hak tersebut secara tupoksi menjadi kewajiban BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di tingkat nasional dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di tingkat lokal daerah.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar terkait aspek pendidikan kebencanaan dalam skema sosialisasi khususnya di Kecamatan Ngargoyoso yakni sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan sekitar tahun 2020 di Balai Desa Jatirejo (<https://timlo.net/baca/86857/bpbd-sosialisasi-kebencanaan-di-ngargoyoso/>).

Kalangan akademisi khususnya perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat strategis dalam membantu upaya sosialisasi manajemen kebencanaan. Sesuai dengan paradigm *governance* yang merupakan perkembangan dari pandangan tentang administrasi negara, bahwa dalam proses melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang efektif maka perlu melibatkan berbagai stakeholder. Selain itu, penyelesaian masalah yang terbaik dapat dilakukan dengan menggunakan keahlian yang lebih interpretatif, bentuk pembuatan keputusan dan kebijakan yang dialogis serta beragam untuk partisipasi publik (Bevir, 2010). Sejalan dengan hal ini perspektif kolaborasi pentahelix juga mendukung adanya pelibatan setidaknya lima (5) stakeholder yakni : **Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah** dan media (Ahmad, 2020). Dengan demikian, dalam pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya menekankan pada kegiatan sosialisasinya saja namun terbentuknya sistem kelembagaan dalam manajemen bencana yang didasari oleh perspektif *community governance* sebagai suatu kebaruaran.

### **Proses dalam Manajemen Bencana**

Sistem kelembagaan yang jelas dan terarah yang dilakukan oleh, dengan atau atas nama masyarakat perlu diwujudkan karena penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang menyeluruh komprehensif dan holistik (Totikidis, Armstrong & Francis, 2005; Ulum, 2014). Adapun yang termasuk proses dalam manajemen bencana berdasarkan keterangan Darmadi (2022) Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar, antara lain :

#### a. Pra bencana atau Pencegahan

Pada tahap awal dalam manajemen bencana yakni upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana. Jika memungkinkan meniadakan bahaya bencana. Kegiatan yang dilakukan misalnya : adanya larangan untuk membakar sampah, larangan melakukan pembakaran hutan atau perladangan, larangan untuk melakukan penambangan batu

dan pasir ilegal, aturan yang ketat tentang eksploitasi air gunung, dan sebagainya.

b. Mitigasi

Tahap kedua yakni upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Terdapat dua bentuk mitigasi yakni : (i) mitigasi struktural, misalnya membuat bendungan, membuat saluran air yang baik, memperbaiki tanggul sungai dan sebagainya; (ii) mitigasi non struktural, misalnya membuat pelatihan kepada masyarakat agar paham apa saja yang dilakukan ketika terjadi bencana, membuat peraturan prosedur keselamatan pada saat terjadinya bencana, memperbaiki tata ruang dan sebagainya.

c. Kesiapsiagaan

Tahap ini merupakan upaya untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang efektif dan efisien, misalnya penyiapan sarana komunikasi, membuat pos-pos komando, penyiapan jalur dan lokasi evaluasi.

d. Peringatan dini

Tahapan ini merupakan upaya untuk memberikan tanda atau isyarat kemungkinan akan segera terjadi bencana, pada kesempatan pertama dan paling awal. Peringatan dini ini diperlukan bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana agar mereka mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Pemberian peringatan dini harus bersifat resmi (*official*), tegas dan tidak membingungkan (*coherent*), bersifat segera (*immediate*), dan harus bisa menjangkau masyarakat terkena dampak (*accessible*)

e. Tanggap darurat

Tahapan ini merupakan upaya yang dilakukan pada saat terjadi bencana, misalnya penyelamatan harta benda dan juga upaya evakuasi korban terdampak.

f. Bantuan darurat



Tahapan ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya sandang, pangan, posko sementara, obat-obatan, sanitasi dan air bersih

g. Pemulihan

Tahapan ini merupakan upaya untuk memfungsikan kembali prasarana dan sarana yang terkena bencana untuk dapat digunakan seperti keadaan semula. Misalnya memperbaiki prasarana sekolah, puskesmas, pasar, dan sebagainya.

h. Rehabilitasi

Tahapan ini merupakan upaya yang dilakukan setelah kejadian bencana. Misalnya menghidupkan kembali roda perekonomian di daerah terdampak bencana

i. Rekonstruksi

Tahapan ini merupakan upaya jangka panjang guna perbaikan aspek fisik maupun non fisik (ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lain yang terdampak) yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan terjadinya bencana di masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut, ruang lingkup manajemen bencana dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Kegiatan pra Bencana : Mitigasi dan Kesiapsiagaan. Kegiatan bersifat *Pro Active*, upaya yang dilakukan adalah prediksi. Sedangkan konsep yang digunakan lebih tepat menggunakan manajemen resiko. Manajemen resiko yakni pengaturan atau manajemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana.
- b. Kegiatan saat terjadi bencana : Tanggap Darurat. Kegiatan bersifat *Reactive* yang dilakukan adalah memberikan peringatan dan bantuan darurat. Sedangkan konsep yang digunakan lebih tepat menggunakan manajemen krisis. Manajemen krisis yakni pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor

pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana

- c. Kegiatan pasca bencana : Pemulihan. Kegiatan bersifat *reactive* yang dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Konsep yang digunakan lebih tepat yakni manajemen krisis

(Tun Lin Moe & Pathranarakul P, 2006; PP No. 21 Tahun 2008; Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses dalam manajemen bencana bukan suatu proses yang dilakukan dalam satu waktu, namun berkesinambungan tanpa henti membuat suatu siklus yang terus menerus harus dilakukan. Seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1. **Siklus Manajemen Bencana**

Sumber : Tun Lin Moe & Pathranarakul P, 2006; Danil, 2021; Darmadi, 2022

### **Sistem kelembagaan berbasis Community Governance**

Mengandalkan pemerintah saja dalam melakukan semua kegiatan tanpa partisipasi masyarakat yang aktif membuat keberhasilan daerah tangguh bencana menjadi kurang efektif. Secara tidak langsung, hal tersebut terkonfirmasi pada

saat sosialisasi masyarakat pada sesi diskusi bahwa tim penanggulangan bencana di daerah ini masih terpusat di kecamatan, hal ini membuat koordinasi dan penanganan kurang cepat. Selain itu kurangnya pelatihan dan tidak terbentuknya standar operasional penanganan bencana juga menjadi faktor yang mengakibatkan banyak kejadian kurang dapat diantisipasi dan tidak tertangani secara optimal.

Permasalahan dari struktur kelembagaan formal yakni kurangnya unit pemerintah yang bertanggung jawab menyebabkan ketidakjelasan garis kewenangan dan keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan terutama untuk tanggap darurat, pemulihan dan rehabilitasi (Moe, Tun Lin & Pairote P, 2006).

Penggunaan pendekatan *community governance* menurut Muis dan Anwar (2018) dan dari pengamatan penulis juga didukung beberapa alasan, antara lain:

1. Masyarakat yang pertama kali mengalami bencana, maka perlu kemampuan merespon bencana secara cepat sebelum bantuan dan luar datang.
2. Kasus di Desa Ngargoyoso adalah lokasinya yang jauh dari pusat perkotaan dan berada di lereng gunung, sehingga proses evakuasi sering mengalami kesulitan baik dari fasilitas alat evakuasi maupun pertolongan yang datang terlambat. Sehingga masyarakat harus dibekali pengetahuan dan SOP untuk menolong dirinya sendiri pada waktu terjadi bencana.
3. Masyarakat adalah pihak yang paling mengenali tingkat kerusakan/kehilangan akibat bencana. Di dalam diskusi pada saat sosialisasi berlangsung, masyarakat menyadari bahwa komunitas yang bisa menjadi garda depan dalam pengenalan gejala bencana yakni dari golongan ibu-ibu. Alasannya yakni waktu mereka yang lebih banyak berada di lingkungan atau tidak bekerja di luar, dan bisa mengamati misalnya ada retakan tanah di sekitar rumah, munculnya mata air secara tiba-tiba, teibuh rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, jika setelah hujan ada genangan lalu tiba-tiba airnya menghilang dalam waktu cepat.

4. Pendekatan *top-down* gagal mengenali kebutuhan lokal masyarakat yang rentan, cenderung mengabaikan kapasitas dan sumberdaya yang potensial, dan di beberapa kasus justru meningkatkan kerentanan.

Sedangkan, langkah nyata yang dapat dilakukan untuk membentuk sistem kelembagaan dengan pendekatan *community governance* dalam kebencanaan menurut Susilowati dan Siwanto (2016) adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat,
2. Memperkenalkan cara membuat peta bahaya setempat
3. Memperkuat kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
4. Mengembangkan organisasi bencana di daerah
5. Memperkaya pengetahuan masyarakat dengan pendidikan tentang bencana
6. Mempertinggi kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup

Pembentukan kelembagaan berbasis *community governance* yang diinisiasi dimulai dari lokasi pengabdian ini mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat. Dari 40 peserta yang hadir terdiri dari muda-mudi, ibu-ibu, bapak-bapak dan beberapa perangkat desa secara aktif menyampaikan pengetahuannya tentang informasi bencana yang pernah terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran perlunya kesiapsiagaan dari masyarakat. Terlihat juga dari informasi yang diberikan ada indikasi potensi sistem kelembagaan berbasis *community governance* yakni kecenderungan yang sangat kuat dalam masyarakat untuk mengedepankan *community self-survival* atau penanganan mandiri dari pada mengandalkan sumber daya dan bantuan dari luar. Hal ini menunjukkan modal sosial yang positif dan baik jika diarahkan untuk membentuk komunitas desa tangguh bencana di mana kekuatan utama berada pada aspek kewenangan koordinatif di level *grass root*. Sesuai dengan pendapat dari Clarke dan Stewart (1998) dalam Totikidis, Armstrong & Francis (2005) yang menyatakan bahwa pendekatan *community governance* adalah berkaitan dengan kekuasaan yang dilaksanakan sedekat mungkin bagi masyarakat, sehingga yang perlu digaris bawahi yakni pentingnya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah

pusat ke tingkat lokal untuk menyelesaikan masalah lokal dan selanjutnya ke komunitas itu sendiri.

Adapun kapasitas komunitas dalam *governance* menurut Sudarmo (2009), antara lain :

1. Kemampuan untuk mengorganisasi dirinya secara informal,
2. Kemauan belajar dari pengalaman sebelumnya dan hal-hal yang belum
3. Diketahui untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang,
4. Bekerja dalam waktu yang jelas dan nyata melalui *network*,
5. Kesiediaan berbagi peran diantara keanekaragaman pelaku/stakeholder sebagai sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia lainnya yang tersedia,

Terselenggaranya distribusi intelegensia untuk memecahkan masalah bersama, dan ini berarti menuntut kesiediaan berbagi informasi dan komunikasi terbuka yang menjamin transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas satu sama lain, dan adaptasi terhadap situasi lingkungan yang *uncertain* dan kompleks

**Tabel 1. Model *Community Governance***

<b>Kepemimpinan</b>	<b>Pemberdayaan</b>	<b>Kepemilikan</b>
Konsep sekelompok orang dan kelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan visi bersama	Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepada orang : 1) yang memiliki sumberdaya; 2) yang dapat mengakses sumber daya.	Terkait dengan cara seseorang terhubung dengan komunitasnya, sehingga ia merasa memiliki dan ingin terlihat eksistensinya dalam komunitasnya.
Indikator : a) Berbagi visi dan pemahaman; b) Partisipasi komunitas; c) Perilaku bekerjasama d) Advokasi masyarakat atau e) komunitas	Indikator : a) Akses terhadap sumberdaya; b) Berbagi kekuasaan; c) Pendelegasian dalam pengambilan keputusan	Indikator: a) Rasa memiliki; b) Rasa peduli; c) Memiliki ikatan pada suatu tempat; d) Menghargai keanekaragaman

Sumber : Totikidis, Amstrong & Francis, 2005

Panduan untuk menerapkan manajemen bencana di Desa Ngargoyoso dilakukan dengan mengacu pada model *Community Governance* menurut Totikidis, Amstrong & Francis (2005) di atas, dengan sosialisasi bertahap memastikan ketiga dimensi yakni kepemimpinan, pemberdayaan dan kepemilikan bisa terinternalisasi di masyarakat.

## **Sosialisasi Sistem Kelembagaan Manajemen Bencana Berbasis *Community Governance***

Sosialisasi system kelembagaan manajemen bencana berbasis community governance kepada masyarakat Desa Ngargoyoso dihadiri oleh para ibu-ibu PKK, bapak-bapak, perangkat desa dan remaja sejumlah kurang lebih 40 orang. Kegiatan diikuti dengan sangat antusias, ditunjukkan dengan diskusi yang mendalam. Masyarakat memberikan informasi terkait kejadian yang pernah dialami dan beberapa tanda-tanda bencana longsor yang mereka pahami. Seperti kerikil yang berjatuh, dan mereka juga menyadari beberapa rumah yang ada potensi terjadi longsor seperti halnya rumah yang berada di tebing.

Peserta juga menanggapi positif dibentuknya lembaga non formal berbasis komunitas yang digerakan oleh Ibu-Ibu sebagai garda terdepan. Mereka berharap kegiatan ini bisa berlanjut dan dilakukan pendampingan secara berkala agar desa Ngargoyoso dapat menjadi desa yang tangguh bencana.

Kegiatan ini dan keberlanjutannya juga mendapatkan dukungan dari perangkat desa dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Saptono sebagai bayan Dukuh Jenak Rt 01 Rw 01. Beliau menyatakan bahwa desa akan senantiasa siap memberikan fasilitas terkait kegiatan ini.

Selain itu, terdapat masukan untuk mengaktifkan organisasi LINMAS untuk turut terlibat menjadi salah satu stakeholder yang paling berperan dalam menjaga keamanan masyarakat, tidak hanya untuk masalah social namun juga permasalahan dalam tanggap bencana. Kegiatan Sosialisasi yang telah dilakukan seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Suasana kegiatan sosialisasi

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil pengabdian masyarakat berupa kegiatan sosialisasi kelembagaan dalam manajemen bencana berbasis *community governance* di dukuh Jenak RT 01 RW 1 Desa Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Ngargoyoso, yakni :

1. Kegiatan ini mendapatkan antusias dan sambutan yang baik dari masyarakat dan perangkat desa yang telah berpartisipasi;
2. Kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tentang pengetahuan manajemen bencana;
3. Kegiatan ini mampu menghasilkan motivasi terbentuknya komunitas tangguh bencana yang di dalamnya fokus pada masyarakat sebagai subjek yang pro aktif;
4. Masyarakat semakin memahami betapa pentingnya peran mereka dalam manajemen kebencanaan melalui sistem kelembagaan berbasis *community governance* terutama pada hal peran koordinasi dan komunikasi.
5. Kegiatan ini ditidakanjuti dengan menggandeng ahli hukum dari kalangan akademisi untuk melakukan pendampingan pembuatan peraturan kepala desa se-kecamatan Ngargoyoso dalam mencapai desa tangguh Bencana dengan mengangkat Desa Ngargoyoso sebagai desa inisiator.

### **Saran**

Saran untuk ke depan perlu memperkuat sistem kelembagaan berbasis *community governance* dengan cara :

1. Pemberian satu ruang khusus baik di balai desa maupun penunjukan rumah warga sebagai posko desa tangguh bencana;
2. Rutin diadakan kegiatan sosialisasi dari dan untuk masyarakat di dampingi dengan pihak BPBD dan akademisi;
3. Adanya pendampingan berkelanjutan untuk Desa Ngargoyoso dalam mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak yang dapat meningkatkan kemampun, skill dan kesiapan dalam menghadapi bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. 2018. Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu strategis. Bumi Aksara: Jakarta
- Ahmad, Yazied T. 2020. Perspektif Kolaborasi Penta Helix Abcgm Pada Program Kangpisman Dalam Mengentaskan Permasalahan Pengelolaan Sampah (Studi Fenomenologi di Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung). Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung
- Bevir, Max. 2010. Democratic Governance. Pricenton University Press: United Kingdom
- Bowles, S., Gintis, H. 2002. Social Capital and Community Governance. The Economic Journal 112 (483), Pp. F419–F436
- Hamid, Saleh Al. 2020. Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance. Oikos Nomos : Jurnal Kajian ekonomi dan Bisnis. Vol 13, No. 1, Pp. 54-68.
- Harijoko dkk. 2021. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia. UGM Press; Yogyakarta
- Hartono, Muhammad Arief.2020.Permodelan risiko Bencana Tanah Longsor Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Digilib UNS: Surakarta
- MG.BPBD Sosialisasi Kebencanaan di Ngargoyoso. <https://timlo.net/baca/86857/bpbd-sosialisasi-kebencanaan-di-ngargoyoso/>. [Diakses pada 10 Agustus 2023, Pukul 21:00 WIB]
- Moe, Tun Lin, Pathranarakul P. 2006. An Integrated Approach to Natural Disaster Management. Disaster Prevention and Management Journal . Vol. 15 No. 3, Pp. 396-413
- Muis, Ichwan dan Anwar, Khairil. 2018. Model Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Asian Social Work Journal. Vol. 3, Issue 4, Pp. 19 – 30.
- Naryanto, Heru Sri. 2011. Analisis Kondisi Bawah Permukaan Dan Risiko Bencana Tanah Longsor Untuk Arahan Penataan Kawasan Di Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Ptlwb-Bppt. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia. Vol. 13, No. 2, Pp.74-81.
- Putra, Agil Trisetiawan. 2023. Tebing Longsor di Ngargoyoso Karanganyar, Listrik Putus Tertimpa Pohon. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6636600/tebing-longsor-di-ngargoyoso-karanganyar-listrik-putus-tertimpa-pohon>. [Diakses pada 6 Juli 2023, pukul 19:00 WIB]
- Putra, Rusnardi R. 2021. Manajemen Bencana. UNP Press: Padang
- Ramadhani, Nuri dan Idajati, Hertiari.* 2017. Identifikasi Tingkat Bahaya Bencana Longsor, Studi kasus: Kawasan Lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jurnal Teknis ITS. Vol. 6 No. 1, Pp C87-C90
- Setyaningsih, Kiki dan Yuliani, Sri. 2022. Community Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi Pada



- Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)). Jurnal Mahasiswa Wacana Publik. Vol 2, No. 2, Pp. 332-346.
- Sudarmo. 2009. Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatanhambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. Jurnal Spirit Publik. Vol 5, No 2.
- Susilowati, Fitri dan Siswanta, Lilik. 2016. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi risiko bencana Berbasis Gender. Jurnal Semar. Vol. 5 No. 1
- Susmayanti, Hari. 2023. Suwarni Tiba-tiba menghilang , diduga jadi korban tanah longsor di Ngargoyoso. <https://jogja.tribunnews.com/2023/02/16/suwarni-tiba-tiba-menghilang-diduga-jadi-korban-tanah-longsor-di-ngargoyoso>. [Diakses pada Juli 2023, pukul 18:30 WIB]
- Syukur, Abdul.2021. Tanggap Bencana Alam Tanah Longsor.DIVA Press: Yogyakarta
- Totikidis, V., Armstrong, A. & Francis, R. 2005. Local Safety Committees and the Community Governance of Crime Prevention and Community Safety. Beyond Fragmented Government: Governance in the Public Sector Conference. Victoria University, Melbourne. Centre for International Corporate Governance Research (CICGR), Faculty of Business and Law, Victoria University.